



BUPATI TOLITOLI

KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI NOMOR: 800/1205.02/BKPSDM

TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN YANG BERUPA KORUPSI

BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri Palu Nomor: **34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pal**, Tanggal 2 Desember 2024 bahwa Saudara **FIRDAUS, S.Sos** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil telah ditahan karena melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 52 ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, huruf j; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 84; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tolitoli tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Ditahan Karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini:

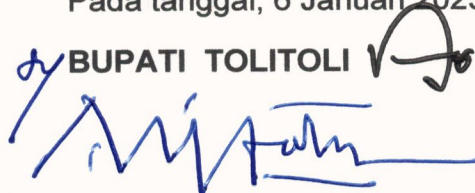
Nama : **FIRDAUS, S.Sos**
NIP : 197812142009041001
Tempat/Tanggal Lahir : Tolitoli, 14 Desember 1978
Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Muda (III/a) / 1 April 2021
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Unit Kerja : Kantor Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Tolitoli
Terhitung Mulai Tanggal : 2 Desember 2024.

KEDUA : Dalam hal sebelum ditetapkan Keputusan ini terdapat Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau anggaran, dinyatakan tetap berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal, 6 Januari 2025


BUPATI TOLITOLI

H. AMRAN HI. YAHYA

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli;
6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Palu;
7. Kepala Kantor Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
8. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI

KANTOR KELURAHAN NALU

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi No.96, Kode Pos. 94513 Tolitoli, Sulawesi Tengah

Nomor : 465/122/SEK
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat sebagai PNS, Karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan.

Kepada

Yth , **BUPATI TOLITOLI**

di-

TOLITOLI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara; dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, antara lain dinyatakan bahwa PNS yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS.
2. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan usul permohonan pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat sebagai PNS :

Nama : Firdaus.S, Sos
Nip : 197812142009041001
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda / (III/a)
Jabatan : Staf Pada Kantor Kelurahan Nalu
Unit Kerja : Kantor Kelurahan Nalu
Instansi : Pemerintah Kabupaten Tolitoli

3. Demikian atas perkenaan dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Tolitoli, 18 Februari 2025

KELURAHAN NALU


ASKAR, S. Sos
Penata Tkt .I (III/d)

Nip. 19700419 200107 1 001



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI TOLITOLI
TINDAK PIDANA KHUSUS

Jl. Magamu No. 92 Kel. Baru Kec. Baolan Kab. Tolitoli
"Untuk Keadilan Dan Kebenaran"
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

P-48

SURAT PERINTAH
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR PRINT-10/P.2.12/Fu.1/01/2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TOLITOLI

- Dasar : 1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pal tanggal 02 Desember 2024
2. Pasal 46 (2), 191, 192, 193, 194, 1 butir 6a jo 197 jo 270, 273 KUHP.
3. Pasal 30 ayat(1) Huruf b UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Pertimbangan : 1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pal tanggal 02 Desember 2024 tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 03 Januari 2025 dan oleh karena itu perlu segera dilaksanakan.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Nama : ALBERTINUS P. NAPITUPULU, S.H., M.H.
Pangkat : Jaksa Madya (IV/a)/19780518 200212 1 006
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum/Eksekutor
2. Nama : HEPPIES MAYKEL H NOTANUBUN, S.H.
Pangkat : Jaksa Muda (III/d) / 198105112006031001
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum/Eksekutor
3. Nama : NUR AZIZ PRABOWO, S.H
Pangkat : Ajun Jaksa Madya (III/a) /19960305 202012 1 015
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum/Eksekutor
4. Nama : PARMAN, SH
Pangkat : Ajun Jaksa Madya (III/a) / 199610102020121011
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum/Eksekutor
- Untuk : 1. Melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pal tanggal 02 Desember 2024 atas nama terpidana FIRDAUS Melanggar Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Melaksanakan perintah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pal tanggal 02 Desember 2024.
3. Melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah ini dengan Berita Acara.
4. Agar dilaksanakan dengan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Dikeluarkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TOLITOLI



ALBERTINUS P. NAPITUPULU, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 197805182002121006

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di-Palu;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di-Palu;
3. Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di-Palu;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;
5. Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu;
6. Terdakwa/Keluarga Terdakwa
7. Arsip





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
PENGADILAN NEGERI PALU

Jalan Dr. Samratulangi No. 46 RT 001 RW 005, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur
Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111, www.pn-palu.go.id, info@pn-palu.go.id

Palu, 04 Desember 2024

Nomor : 5045 /PAN.PN.W21-U1/HK2.1/XII/2024

Kepada Yth,
Kepala Kejaksaan Negeri Toli-toli
di -

PALU

SURAT PENGANTAR

Dengan Hormat disampaikan:

No.	Uraian	Banyak	Ket.
1.	Pengiriman Petikan Putusan Perkara Tindak Pidana Koruptor Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal atas nama Terdakwa FIRDAUS.	1 (satu) eksemplar	-

PENGADILAN NEGERI PALU
PAN-PANITERA



Tembusan:

1. Kepala Rumah Tahanan Negara
2. Sdr. Terdakwa **FIRDAUS** di Jl. Siswa No. 25 Kel. Nalu Kec. baolan kab. Tolitoli Kota Palu;
3. Penasihat Hukum Terdakwa Mohamad Faizal, S.H., M.H., dan Alvando Andrew Kindangen, S.H. yang berkantor di Alvando Andrew, Jhons & Partners yang beralamat di Jalan Tanjung Balantak Nomor 18 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Arsip.

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : FIRDAUS |
| 2. Tempat Lahir | : Tolitoli |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : 46 Tahun/14 Desember 1978 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat Tinggal : Jalan Siswa
Nomor 25 Kelurahan Nalu Kecamatan
Baolan Kabupaten Tolitoli Sulawesi
Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil (Bendahara
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tolitoli 2018) |
| 9. Pendidikan | : Strata Satu (S-1 Ilmu Sosial) |

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Tahanan Kota, oleh:

1. Penuntut Umum, Tahanan Kota, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 17 Juli 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal, tertanggal 15 Juli 2024, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal, tertanggal 31 Juli 2024, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
4. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penetapan Nomor 119/Pen.Pid.-TPK/2024/PT Pal, tertanggal 02 Oktober 2024, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penetapan Nomor 128/Pen.Pid.-TPK/2024/PT Pal, tertanggal 04 November 2024, sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Mohamad Faizal, S.H., M.H., dan Alvando Andrew Kindangen, S.H. yang berkantor di Alvando Andrew, Jhons & Partners yang beralamat di Jalan Tanjung Balantak Nomor 18 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/SK/2024/PN. Pal, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pal Tanggal 12 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pal Tanggal 12 Juli 2024, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, para Ahli dan Terdakwa, serta memeriksa alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **Firdaus** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa **Firdaus** oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Firdaus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Firdaus** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Firdaus** berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp312.461.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Firdaus** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa **Firdaus** tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 60 (enam puluh) bundel Laporan Pertanggungjawaban Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU, yang terdiri atas: (3355.003.A) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPA dan UAPPA E-1, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Honor Output Kegiatan POKJA UAPA DAN UAPPA sejumlah Rp9.000.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK sejumlah Rp5.309.000,00;
 - (3355.009.A) Kegiatan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Keuangan Tahapan Pemilu 2019, yang terdiri atas:

- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan barang Konsumsi berupa ATK sejumlah Rp2.400.000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota berupa transport PPK dan Uang Harian PPK sejumlah Rp5.400.000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota berupa Perjalanan Dinas ke Provinsi sejumlah Rp2.247.000,00;
- (3355.009.B) Kegiatan Monitoring/Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK sejumlah Rp4.400.000,00;
- (3356.009.A) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Logistik berbasis e-Procurement, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Biasa sejumlah Rp6.840.700,00;
- (3356.014.A) Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan e-Procurement Sirup dan e-Tendering, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Honor Output Kegiatan berupa Honor Operator SIRUP sejumlah Rp1.200.000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Biasa sejumlah Rp22.721.500,00;
- (3356.014.D) Kegiatan Bimbingan Teknis Mekanisme Pendistribusian Logistik Pemilu 2019, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Biasa sejumlah Rp9.917.700,00;
- (3356.014.F) Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Mekanisme Penghapusan Logistik Pemilihan, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Biasa sejumlah Rp13.651.000,00;
- (3356.014.RE) Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2019, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Biasa sejumlah Rp7.176.000,00;

- (3356.014.RG) Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu 2019, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Biasa sejumlah Rp21.839.000,00;
- (3356.015.A) Kegiatan Pengadaan Logistik Pemilu 2019, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Bahan berupa ATK sejumlah Rp49.523.700,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Honor Output Kegiatan berupa POKJA ULP sejumlah Rp10.920.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa Kelengkapan Pemilu Legislatif 2019 Presiden dan Wakil Presiden 2019 sejumlah Rp95.867.300,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Beban Jasa Lainnya berupa Beban biaya Pembongkaran Kotak Suara sejumlah Rp9.396.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Biasa sejumlah Rp6.339.300,00;
- (3356.015.C) Kegiatan Pengadaan Komputer/PC, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa biaya Pengadaan Komputer/ PC sejumlah Rp21.320.000,00;
- (3356.015.RE.Z) Kegiatan Koordinasi, Asistensi, Monitoring dan Evaluasi LK UAPPA dan UAPPA E-1 dan Alat Penghitungan Suara, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Belanja Modal Peralatan Mesin dan Alat SITUNG Pemilu 2019 sejumlah Rp176.400.000,00;
- (3357.004.A) Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2018 Serta Realisasi, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK, sejumlah Rp2,137.500,00;

- (3357.010.A) Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2018, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK sejumlah Rp3.300.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Biasa berupa Konsultasi ke KPU Provinsi sejumlah Rp2.180.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berupa koordinasi ke Dukcapil dan monitoring/ supervise pemutakhiran data pemilih sejumlah Rp33.150.000,00;
- (3357.026.A) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK, sejumlah Rp3,310,000,00;
- (3357.032.A) Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Honor Output Kegiatan POKJA RENJA sejumlah Rp27.100.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK sejumlah Rp9.567.500,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sejumlah Rp5.220.000,00;
- (3357.032.B) Kegiatan Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahapan Pemilu TA 2018, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Biasa berupa Revisi DIPA ke KANWIL Palu sejumlah Rp4.140.000,00;
- (3357.032.T) Kegiatan Tambahan Anggaran Kebutuhan Rapat Pimpinan, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sejumlah Rp21.690.500,00;
- (3357.033.A) Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu 2019 Ta. 2018, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK sejumlah Rp1.390.000,00;
- (3357.033.B) Kegiatan Rapat Persiapan Pemilu, yang terdiri atas:

- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK senilai Rp. 2.135.000,-
- (3357.033.C) Kegiatan Evaluasi Kegiatan Tahapan Pemilu, Yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK sejumlah Rp2.135.000,00;
- (3357.033.D) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Di Tahun 2018, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Honor Output Kegiatan POKJA PENYUSUNAN LAP sejumlah Rp65.600.000,00;
- (3357.034.A) Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Bahan berupa Pengadaan Ban Lengan Topi Pantarlih sejumlah Rp37.300.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Honor Output Kegiatan Pokja Pemutakhiran Data Pemilih sejumlah Rp36.300.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Konsumsi berupa ATK sejumlah Rp4.685.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Jasa Lainnya berupa Honor Tenaga Teknis Pendukung sejumlah Rp19.000.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Biasa sejumlah Rp198,822,900,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting sejumlah Rp37.750.000,00;
- (3357.035.A) Kegiatan Sewa Jaringan Internet, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Biaya Pembayaran Layanan Internet Kantor sejumlah Rp8386.399,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Pembelian 1 Unit PC/ Laptop sejumlah Rp19.033.000,00;
- (3357.039.A) Kegiatan Pembentukan Badan Adhock, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Honor Output Kegiatan Pokja Ad Hoc sejumlah Rp15.150.000,00;

- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Konsumsi berupa ATK sejumlah Rp6,930,000,00
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Biasa, sejumlah Rp3,000,000,00
- (3357.039.T) Kegiatan Pembentukan Tambahan PPK, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Perjalanan Dinas ke Kecamatan sejumlah Rp16.030.000,00,
- (3357.040.A.RE.T dan 041.A.RE.T) Fasilitas PPK dan PPS
- 1 (satu) bundel LPJ Biaya Operasional PPK dan PPS sejumlah Rp1.219.966.000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Biaya Honorarium PPK dan PPS sejumlah Rp969.719.000,00,
- 1 (satu) bundel LPJ Pencetakan Spanduk dan Baliho 109 Desa sejumlah Rp117.720.000,00;
- (3357.042.A) Fasilitas Pantarlih, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Konsumsi berupa ATK Pantarlih sejumlah Rp37.300.000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Honorarium Panarlih sejumlah Rp506.128.000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Bantuan Transport Pantarlih sejumlah Rp33.580.000,00;
- (3358.006) Kegiatan BIMTEK SIPP, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas sejumlah Rp3.480.000,00;
- (3360.994.A) Kegiatan Kebutuhan Sehari Hari Perkantoran, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Keperluan Perkantoran berupa Langganan Koran sejumlah Rp12,820,000,00;
- (3360.994.B) Kegiatan Langganan Daya Dan Jasa, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Pengiriman Surat Dinas, sejumlah Rp25.000,00,
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Langganan Daya dan Jasa berupa Langganan Listrik sejumlah Rp25,440,545,00;

- (3360.994.C) Kegiatan Pemeliharaan Kantor, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan sejumlah Rp61.003.000,00;
 - (3360.994.H) Kegiatan Honor Operasional Satuan Kerja, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas sejumlah Rp2.550.600,00;
 - (3360.994.I) Kegiatan Hibah Operasional, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Non Operasional sejumlah Rp250.000.000,00;
 - (3361.005.A) Kegiatan Reviu Laporan Keuangan, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Biasa sejumlah Rp3.149.000,00;
2. 1 (satu) bundel Laporan PertanggungJawaban Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur KPU, yang terdiri atas (3362.004.A) Kegiatan Pembelian Kendaraan Roda 4, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Pembelian Kendaraan Bermotor sejumlah Rp322.244.964,00;
3. 1 (satu) bundel Laporan PertanggungJawaban Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, yang terdiri atas: (3363.019.A) Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Honor Output Kegiatan Pokja Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Pemilu sejumlah Rp27.850.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK sejumlah Rp9.418.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Jasa Profesi berupa Honorarium sejumlah Rp4.300.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting sejumlah Rp18.050.000,00;
 - 1 (satu) bundel Surat Tugas Perjalanan Dinas ke Palu (2 orang) sejumlah Rp3.440.000,00;

- (3363.019.B) Kegiatan Pelayanan & Fasilitas Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Anggota Dpr,Dpd & Dprd Serta Pemilu Presiden & Wapres, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK, sejumlah Rp6.027.000,00;
- (3363.020.T) Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi Dan Dprd Kab/Kota, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota sejumlah Rp5.289.000,00;
- (3363.021.A) Kegiatan Persiapan Penyusunan, Pengaturan, Dan Kebijakan Terkait Verifikasi Perseorangan, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota sejumlah Rp9.264.900,00;
- (3363.021.B) Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perseorangan Peserta Pemilu, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Honor Output Kegiatan Pokja Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Calon DPD Dapil Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah Rp36.700.000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sejumlah Rp144.050.000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota sejumlah Rp14.246.200,00;
- (3363.021.C) Kegiatan Penetapan Penyusunan Dan Penyampaian Berita Acara Verifikasi Faktual, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK, sejumlah Rp1.480.000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sejumlah Rp14.151.900,00;
- (3363.022.A) Kegiatan Verifikasi Faktual, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Bahan, sejumlah Rp3.187.500,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Honor Output Kegiatan Pokja Verifikasi Partai Politik sejumlah Rp27.850.000,00;

- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, sejumlah Rp1,870,000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sejumlah Rp78.300.000,00;
- (3363.022.B) Kegiatan Penetapan, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Bahan, senilai Rp4,330,000,00
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Biasa sejumlah Rp12,990,000,00;
- (3364.006.A) Kegiatan Fasilitas Pendidikan Pemilih, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Konsumsi berupa ATK sejumlah Rp13,401,000,00;
- (3364.032.A) Kegiatan Pembentukan Rumah Pintar Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK sejumlah Rp1.125.000,00;
- (3364.042.A) Kegiatan Pemetaan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Pemilu 2019, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Honor Output Kegiatan Pokja Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu 2019 sejumlah Rp16.400.000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK, sejumlah Rp1,000,000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Biasa, sejumlah Rp6,330,000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, sejumlah Rp26,500,000,00;
- (3364.043.A) Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengajuan Daftar Calon, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Honor Output Kegiatan Pokja Proses Pencalonan Anggota DPRD sejumlah Rp40.650.000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK sejumlah Rp2.192.000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Biasa sejumlah Rp16.230.000,00;

- (3364.043.B) Kegiatan Pengajuan, Penelitian Dokumen, Serta Penetapan Daftar Calon Anggota DPR, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Jasa Lainnya sejumlah Rp138.638.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Biasa sejumlah Rp15.096.500,00;
- (3364.043.C) Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencalonan Anggota DPR, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Biasa sejumlah Rp18.558.600,00;
- (3364.043.D) Kegiatan Sinkronisasi Data Calon, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Perjalanan Dinas sejumlah Rp5.773.000,00;
- (3364.047.A) Kegiatan Supervisi Kampanye Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Bahan berupa Snack sejumlah Rp550.000,00;
- (3364.047.T) Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Pengadaan Alata Peraga Kampanye PEMILU sejumlah Rp284.799.240,00;
- (3364.049.A) Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Biasa sejumlah Rp19.150.000,00;
- (3364.049.B) Kegiatan Supervisi Dan Monitoring Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa ATK senilai Rp. 7.325.000,-
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas Biasa sejumlah Rp72.608.800,00;
- (3364.050.A) Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pembentukan Badan Adhock, yang terdiri atas:

- 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Pengadaan Alat Peraga Kampanye Pemilu sejumlah Rp17,163,000,00;
- (3364.050.B) Kegiatan Sosialisasi Rekrutmen Kpu Provinsi & Kpu Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Beban Jasa Lainnya sejumlah Rp8.000.000,00;
- (3364.050.E) Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Bahan Pencetakan Spanduk & Baliho sejumlah Rp69.400.000,00;
- (3364.050.F) Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota Dpr, Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/Kota Serta Pencalonan Presiden & Wakil Presiden, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Bahan Pencetakan Spanduk & Baliho sejumlah Rp36.700.000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Jasa Profesi sejumlah Rp2.375.000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Jasa Lainnya sejumlah Rp2.770.000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sejumlah Rp14.425.000,00;
- (3364.050.G) Kegiatan Sosialisasi Tahapan Kampanye, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Bahan Pencetakan Spanduk sejumlah Rp32.700.000,00;
- (3364.052.A) Kegiatan Kursus Kepemiluan, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Bahan sejumlah Rp8.800.000,00;
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Jasa Profesi sejumlah Rp4.275.000,00;
- (3364.052.B) Kegiatan Forum Warga Berbasis Keluarga, yang terdiri atas:
- 1 (satu) bundel LPJ Belanja Bahan sejumlah Rp925.000,00;

- (3364.052.C) Kegiatan Gerakan Sadar Pemilu Pagelaran Seni Budaya Satu Tahun Menyongsong Pemilu 2019 Pemilu Berdaulat Negara Kuat, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Realisasi Kegiatan Gerakan Sadar Pemilu Pagelaran Seni Budaya senilai Rp. 30.200.000,-
 - (3364.052.D) Kegiatan Pendidikan Pemilih Disabilitas, Pemilih Pemula Dan Perempuan, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Bahan sejumlah Rp4.400.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota sejumlah Rp46.530.000,00;
 - (3364.052.E) Kegiatan Konsolidasi Regional Bimtek Parmas, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Beban Perjalanan Dinas Biasa sejumlah Rp11.256.500,00;
 - (3364.052.G) Kegiatan PU Goes to School, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Bahan sejumlah Rp3.000.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Jasa Profesi sejumlah Rp2.700.000,00;
 - 1 (satu) bundel LPJ Belanja Perjalanan Dinas sejumlah Rp5.250.000,00;
1. 1 (Satu) Scan Surat Pernyataan Yang Di Tandatangani Oleh Firdaus Tertanggal 15 September 2021;
 2. 7 (Tujuh) Lembar Rekapitulasi Pembayaran Honorarium Badan Penyelenggara Ad Hoc Atas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Legislatif Tahun 2019 Tahun Anggaran 2018 Pada KPU Kabupaten Tolitoli;
 3. 6 (Enam) Lembar Rekapitulasi Realisasi Belanja Tidak Didukung Dengan Bukti Pertanggungjawaban Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2018 Pada KPU Kabupaten Tolitoli;
 4. 8 (delapan) Lembar Rekapitulasi {embayaran Honorarium Kelompok Kerja tidak sesuai Ketentuan Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kabupaten Tolitoli;

5. 6 (Enam) Lembar Realisasi Belanja Atas Pembayaran Diragukan Kebenarannya Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Tahun 2019 Pada KPU Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018;
6. 1 (satu) bundel Rincian Keras Kerja Satker T.A. 2018;
7. 7 (tujuh) lembar Laporan Realisasi KPU Kabupaten Tolitoli;
8. 12 (dua belas) bundel Buku Kas Umum bulan Januari – Desember KPU Kab. Tolitoli Tahun Anggaran 2018;
9. 1 (Satu) Bundel Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Putusan Nomor :88-PKE-DKPP/V/2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
10. 3 (Tiga) Lembar Rekapitulasi Penanggungjawab Kerugian Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2018 Pada KPU Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018
11. 3 (Tiga) Lembar Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Kinerja Kenerja Dan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2018 Pada KPU Kabupaten Tolitoli
12. 1 (satu) bundel Bukti Setor ke Kas Negara atas nama Bustanil dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 8179C48VUJ79DR2G Tentang Pengembalian Pengeluaran yang Tidak Sesuai Ketentuan, yang Digunakan untuk keperluan Pribadi sejumlah Rp20,000,000,00 tanggal 2 September 2021
 - 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 6E73C48VUU79DS48 Tentang Pengembalian Pengeluaran yang Tidak Sesuai Ketentuan, yang Digunakan untuk keperluan Pribadi sejumlah Rp30,000,000,00 tanggal 2 September 2021;
 - 2(dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 21AB148VLT71ON3K Tentang Pengembalian Pengeluaran yang Tidak Sesuai Ketentuan, yang Digunakan untuk keperluan Pribadi sejumlah Rp10,000,000,00 tanggal 11 September 2021;

- 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN C76B07QLTIH3L1T2 Tentang Pengembalian Pengeluaran yang Tidak Sesuai Ketentuan, yang Digunakan untuk keperluan Pribadi sejumlah Rp600,000,00 tanggal 13 September 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN DO27F8N3DO3G1VKT Tentang Pengembalian Pengeluaran yang Tidak Sesuai Ketentuan, yang Digunakan untuk keperluan Pribadi sejumlah Rp200,000,00 tanggal 13 September 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN ED24248VUU7112SQ Tentang Pengembalian Pengeluaran yang Tidak Sesuai Ketentuan, yang Digunakan untuk keperluan Pribadi sejumlah Rp250,000,00 tanggal 13 September 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 82D288N3DO3G2101 Tentang Pengembalian Pengeluaran yang Tidak Sesuai Ketentuan, yang Digunakan untuk keperluan Pribadi sejumlah Rp100,000,00 tanggal 13 September 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 1469E48VUJ7112SQ Tentang Pengembalian Pengeluaran yang Tidak Sesuai Ketentuan, yang Digunakan untuk keperluan Pribadi sejumlah Rp100,000,00 tanggal 13 September 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 3E6B33CIEO5K2AV Tentang Pengembalian Pengeluaran yang Tidak Sesuai Ketentuan, yang Digunakan untuk keperluan Pribadi sejumlah Rp2,000,000,00 tanggal 13 September 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 87BF68N3DO3G213P Tentang Pengembalian Pengeluaran yang Tidak Sesuai Ketentuan, yang Digunakan untuk keperluan Pribadi sejumlah Rp500,000,00 tanggal 13 September 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 702658N3DO3G1VP9 Tentang Pengembalian Pengeluaran

yang Tidak Sesuai Ketentuan, yang Digunakan untuk keperluan Pribadi sejumlah Rp750,000,00 tanggal 13 September 2021;

- 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 3E4BC55DEDPUDVHB Tentang Pengembalian Pengeluaran yang Tidak Sesuai Ketentuan, yang Digunakan untuk keperluan Pribadi sejumlah Rp5,000,000,00 tanggal 13 September 2021;
 - 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN EA0BC55DEDPUDVER Tentang Pengembalian Pengeluaran yang Tidak Sesuai Ketentuan, yang Digunakan untuk keperluan Pribadi sejumlah Rp1,000,000,00 tanggal 13 September 2021
 - 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 21COA48VUJ7I11QE Tentang Pengembalian Pengeluaran yang Tidak Sesuai Ketentuan, yang Digunakan untuk keperluan Pribadi sejumlah Rp800,000,00 tanggal 13 September 2021
13. 2 (dua) lembar fotocopy Kuitansi sejumlah Rp195.683.000,00 Tentang Pinjaman Pribadi Saudara **Firdaus** dan diselesaikan/dilunasi pada bulan oktober 2019, tertanggal 11 Maret 2019;
14. 3 (tiga) Bundel Map Berkas SPP dan SPM TA. 2018;
15. 1 (satu) bundel Hardcopy SP2D TA. 2018;
16. 1 (satu) file SK Pengelolaan Keuangan TA. 2018,
17. 1 (satu) Map Rekening Koran Januari - Desember 2018,
18. 2 (dua) Bundel SPM Ganti Uang NIHIL April dan Desember Ta. 2018;
19. 1 (satu) Map Bukti setor pengembalian kerugian negara TA. 2018, yang terdiri atas:
- 2 (dua) Lembar Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Tujuan Tertentu Atas Kinerja Keuangan dan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 TA 2018 Nomor lhp : LAP-03/PD TT/IW3/IU/IV/2021.
 - 3 (tiga) Lembar Rekapitulasi Penanggungjawab Kerugian Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Anggara Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2018 Pada KPU Kab. Tolitoli TA. 2018 tanggal 16 September 2021.

- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Hasil Tidak Lanjut Pertanggungjawaban Kerugian Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2018 Pada Kab. Tolitoli Khusus Pokja Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik tanggal 15 Desember 2021.
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Hasil Tindak Lanjut Pertanggungjawaban Kerugian Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2018 Pada Kabupaten Tolitoli Khusus Pokja Yang Anggota Pokja Berasal Dari Luar Instansi tanggal 8 Oktober 2021;
- 3 (tiga) Lembar Rekapitulasi Hasil Tindak Lanjut Pertanggungjawaban Kerugian Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2018 Pada Kab. Tolitoli Khusus Perjalanan Dinas tanggal 08 Oktober 2021;
- 3 (tiga) Lembar Rekapitulasi Hasil Tindak Lanjut Pertanggungjawaban Kerugian Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2018 Pada Kab. Tolitoli Khusus Perjalanan Dinas tanggal 15 Desember 2021;
- 2 (dua) Lembar Penyampaian Laporan Tidak Lanjut (PDTT) TA. 2018 KPU Kab. Tolitoli tanggal 8 Oktober 2021
- 5 (lima) Lembar Daftar Setoran Penanggungjawab Kerugian Negara Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp. 105.992.300 tanggal 29 September 2021;
- 3 (tiga) bundel Bukti Setor ke Kas Negara atas nama SULAEMAN dengan rincian:
 - a. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN E388D7QLTTHFD3JG Tentang Kelebihan Perjadin

- Monitoring DPSHP Kecamatan Ogoideide sejumlah Rp300,000,00 tanggal 24 September 2021;
- b. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 6AEAA55DEDQA6369 Tentang Kelebihan Perjadin Monitoring DPSHP Kecamatan Basidondo sejumlah Rp620,000,00 tanggal 24 September 2021;
 - c. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 011003CIE0LMLF33 Tentang Pengembalian Pokja Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik sejumlah Rp760,000,00 tanggal 29 September 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Irwan B. dengan Nomor NTPN E5C5B6U8E2V2VE3B tentang Kelebihan Perjadin GMHP sejumlah Rp150,000,00 tanggal 23 September 2021
 - 3 (tiga) bundel Bukti Setor ke Kas Negara atas nama Muhadir dengan rincian:
 - a. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN AAA5BON9V8UC8O6G Tentang Selisih Uang Penginapan Perjadin Jakarta sejumlah Rp500,000,00 tanggal 27 September 2021;
 - b. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN D537E61QU8CQSLNS Tentang Selisih Uang Penginapan Perjadin Jakarta sejumlah Rp104,800,00 tanggal 29 September 2021;
 - c. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 4F6018N3DO403LK7 Tentang Selisih Uang Harian Monitoring GMHP di Kecamatan Dampal Selatan (Damsel) dan Dampal Utara (Damput) sejumlah Rp1.350.800,00 tanggal 29 September 2021
 - 4 (empat) bundel Bukti Setor ke Kas Negara atas nama I Made Koto Parianto dengan rincian:
 - a. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN D85B03CIEOLICNP3 tentang Selisih Uang Harian Perjadin Palu sejumlah Rp200,000,00 tanggal 28 September 2021;
 - b. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 23B427QLTTHGDP6S tentang Selisih Uang Penginapan

Perjadin Palu sejumlah Rp200,000,00 tanggal 28 September 2021;

- c. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 359ODON9V8UD5PBK tentang Selisih Uang Harian Monitoring DPSHP sejumlah Rp200,000,00 tanggal 28 September 2021;
- d. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN A22E22G4UU35VRG4 tentang Selisih Uang Harian Monitoring DPSHP di Kecamatan Dondo sejumlah Rp60,000,00 tanggal 28 September 2021
- 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Ovelio Layuk dengan Nomor NTPN EA6B97QLTTHFCFKO tentang Kelebihan Perjadin GMHP sejumlah Rp40,000,00 tanggal 23 September 2021;
- 3 (tiga) bundel Bukti Setor ke Kas Negara atas nama Herdyanti dengan rincian:
 - a. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 485401JNF3GPJEL7 tentang Selisih Perjadin Monitoring GMHP di Kecamatan Lampasio dan Ogodeide sejumlah Rp100,000,00 tanggal 24 September 2021;
 - b. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN F2E817QLTTJTDOU tentang Selisih Perjadin Monitoring DPSHP di Kecamatan Damput sejumlah Rp610,000,00 tanggal 06 Oktober 2021;
 - c. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 96CBB1JNF3J2EB5 tentang Perjadin Monitoring GMHP di Kecamatan Lampasio dan Ogodeide sejumlah Rp870,000,00 tanggal 06 Oktober 2021
- 2 (dua) bundel Bukti Setor ke Kas Negara atas nama Aswan dengan rincian:
 - a. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN C4C6DON9V8UC3KRO tentang Kelebihan Perjadin ST Nomor 102/ST/7204/SEK/KAB/X/2018 sejumlah Rp100,000,00 tanggal 23 September 2021;
 - b. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN E10002G4UU398SGA tentang Pengembalian Pokja

Monitoring Supervisi Penghapusan Logistik sejumlah Rp665,000,00 tanggal 29 September 2021;

- 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Moh. Yakin dengan Nomor NTPN21D670N9V8UC546U tentang Pengembalian Perjadin atas Audit Inspektorat KPU sejumlah Rp1,760,000,00 tanggal 24 September 2021;
- 2 (dua) bundel Bukti Setor ke Kas Negara atas nama Arjun Sandegi dengan rincian:
 - a. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 623386U8E2V40V55 tentang Selisih Uang Harian Monitoring DPSHP Kecamatan Galang sejumlah Rp200,000,00 tanggal 27 September 2021;
 - b. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN C35AO48VUU7UPVDQ tentang Selisih Uang Monitorong GMHP di Kecamatan Baolan dan Galang sejumlah Rp40,000,00 tanggal 27 September 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Sri Sulastri dengan Nomor NTPN ADF608N3DO3RQ294 tentang Kelebihan Perjadin GMHP di Kecamatan Galang sejumlah Rp40,000,00 tanggal 24 September 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Farid Wijaya dengan Nomor NTPN 7ABF68N3DO697BCN tentang Pengembalian Perjadin Monitoring DPSHP di Kecamatan Ogodeide sejumlah Rp500,000,00 tanggal 10 Mei 2021;
- 2 (dua) bundel Bukti Setor ke Kas Negara atas nama Rahmat dengan rincian:
 - a. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN DA3721JNF3GO107P tentang Kelebihan Perjadin GMHP di Kecamatan Dondo dan Basidondo sejumlah Rp20,000,00 tanggal 24 September 2021;
 - b. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 67CO16U8E2V300NU tentang Kelebihan Perjadin Monitoring DPSHP di Kecamatan Galang sejumlah Rp200,000,00 tanggal 24 September 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Ardian dengan Nomor NTPN1A8F67QLTTJSNON8 tentang Kelebihan Perjadin atas

Audit Inspektorat KPU sejumlah Rp1,449,000,00 tanggal 4 Oktober 2021;

- 2 (dua) bundel Bukti Setor ke Kas Negara atas nama Alfauzi dengan rincian:
 - a. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 18C650N90MD7D6 tentang Pengembalian Pokja Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik sejumlah Rp550,000,00 tanggal 1 Oktober 2021;
 - b. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 747D748VUUA817QD tentang Pengembalian Perjadin atas Audit Inspektorat KPU sejumlah Rp1,160,000,00 tanggal 1 Oktober 2021;
- 2 (dua) bundel Bukti Setor ke Kas Negara atas nama Yusdin dengan rincian:
 - a. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN OA72F2G4UU5F779Q tentang Pengembalian Pokja Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik sejumlah Rp550,000,00 tanggal 1 Oktober 2021;
 - b. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 235086U8E31D87KT tentang Pengembalian Perjadin atas Audit sejumlah Rp500,000,00 tanggal 1 Oktober 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Dadang dengan Nomor 440B43CIEOLICVTD tentang Pengembalian Perjadin Monitoring DPSHP di Kecamatan Dakopemearan sejumlah Rp300,000,00 tanggal 24 September 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Moh. Irfan dengan Nomor 38C6F55DEDQA99OF tentang Pengembalian Perjadin Monitoring DPSHP di Kecamatan Dondo sejumlah Rp500,000,00 tanggal 24 September 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Zulfikri dengan Nomor 811ED3CIEOLIDFSL tentang Pengembalian Perjadin Monitoring DPSHP di Kecamatan Dampal Utara sejumlah Rp500,000,00 tanggal 24 September 2021;
- 2 (dua) bundel Bukti Setor ke Kas Negara atas nama Syarifa Nurhaerani dengan rincian:

- a. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 6F0836U8E2V41HPD tentang Pengembalian Perjadin Monitoring DPSHP di Kecamatan Lampasio sejumlah Rp100,000,00 tanggal 24 September 2021;
- b. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN CCACOON9V9OPDUBK tentang Pengembalian Perjadin Monitoring DPSHP di Kecamatan Lampasio sejumlah Rp400,000,00 tanggal 4 Oktober 2021;
- 2 (dua) bundel Bukti Setor ke Kas Negara atas nama Siti Fatima dengan rincian:
 - a. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 443292G4UU352KIU tentang Pengembalian Perjadin Monitoring DPSHP di Kecamatan Dakopemear sejumlah Rp100,000,00 tanggal 27 September 2021;
 - b. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN DEODE3CIEONUM28F tentang Kelebihan Perjadin atas Audit Inspektorat KPU sejumlah Rp1,060,000,00 tanggal 4 Oktober 2021;
- 2 (dua) bundel Bukti Setor ke Kas Negara atas nama Edi Surianto dengan rincian:
 - a. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN C371CON9V8UD5VMO tentang Pengembalian Perjadin Monitoring DPSHP di Kecamatan Basidondo sejumlah Rp500,000,00 tanggal 24 September 2021;
 - b. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 7DA718N3DO693053 tentang Pengembalian Pokja Monitoring dan Penghapusan Logistik sejumlah Rp550,000,00 tanggal 4 Oktober 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Abdul Rahman dengan Nomor NTPN DC26461QU8F3TTOS tentang Pengembalian Perjadin Monitoring DPSHP di Kecamatan Basidondo sejumlah Rp500,000,00 tanggal 5 Oktober 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Alfian Masyhur dengan Nomor NTPN FF9C28N3DO686LAB tentang Pengembalian Uang Transpor Perjadin Jakarta sejumlah Rp3,077,000,00 tanggal 4 Oktober 2021;

- 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Moh. Akram dengan Nomor NTPN FD8591JNF3J5Q43H tentang Pengembalian Uang Transpor Perjadin ke Palu sejumlah Rp500,000,00 tanggal 4 Oktober 2021;
- 5 (lima) bundel Bukti Setor ke Kas Negara atas nama Bustanil dengan rincian:
 - a. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor AFOBCON9V9OPFRCO tentang Pengembalian Pokja Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik sejumlah Rp712,000,00 tanggal 4 Oktober 2021;
 - b. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN C55F148VUJAB414K tentang Pengembalian Selisih Perjadin ke Palu sejumlah Rp1,857,000,00 tanggal 4 Oktober 2021;
 - c. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN FA253ON9V9OPGO51 tentang Pengembalian Perjadin GMHP di Kecamatan Dakopemear dan Tolut sejumlah Rp1,350,000,00 tanggal 4 Oktober 2021;
 - d. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN 86FF20N9OPGOUS tentang Pengembalian Perjadin GMHP di Kecamatan Galang dan Baolan sejumlah Rp460,000,00 tanggal 4 Oktober 2021;
 - e. 2 (dua) lembar Bukti Setor dengan Nomor NTPN FEB58N3DO694VH7 tentang Pengembalian Perjadin DPSHP di Kecamatan Basidondo sejumlah Rp620,000,00 tanggal 4 Oktober 2021;
 - f. 2 (dua) lembar bukti setor atas nama Bustanil dengan nomor NTPN 1292D3CIEOO22559 sejumlah Rp500,00 tanggal 8 Oktober 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Hendra T. Ahmad dengan Nomor NTPN 842163CIEOLHC7KN tentang Kelebihan Perjadin Bimbingan Teknis Sirup Surabaya sejumlah Rp300,000,00 tanggal 24 September 2021;
- 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Ulian dengan Nomor NTPN 8AO3D264UU5HBUF5 tentang Pengembalian Pokja Penataan Dapil Bulan Februari sejumlah Rp902,500,00 tanggal 5 Oktober 2021;

- 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Jessi Chandra Murti dengan Nomor NTPN 5E9577QLTTJSM56U tentang Pengembalian Pokja Penyusunan Rencana Kerja Bulan November dan Desember sejumlah Rp1,900,000,00 tanggal 5 Oktober 2021;
 - 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Ismail Maluku dengan Nomor NTPN 47B3F1JNF3J5QUMU tentang Pengembalian Pokja Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Calon DPD Bulan Mei dan Juni sejumlah Rp1,805,000,00 tanggal 5 Oktober 2021;
 - 2 (dua) lembar Bukti Setor atas nama Wahyuddin dengan Nomor NTPN F3FCA7QLTTJSR8CG tentang Pengembalian Pokja Proses Pencalonan Anggota DPRD Bulan Juli s/d September sejumlah Rp1,900,000,00 tanggal 5 Oktober 2021;
20. 1 (satu) Map Kronologis Temuan Perorangan, yang terdiri atas:
- 9 (sembilan) Lembar Surat Tugas Konsultasi atas Rekomendasi BPK RI Terhadap Hasil Laporan Dana Hibah Pilkada Tahun 2015, SELAMA 4 (empat) Hari tanggal 27 Desember s/d 30 Desember 2018 di Jakarta.
 - 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Tanggung Jawab Muthlak (SKTJM) tanggal 5 Oktober 2021;
 - 1 (satu) bundel Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 141/PW.02-SD/IW3/IU/VIII/2021 tentang Penegasa Tindak Lanjut Hasil PDTT KPU Kab. Tolitoli Ta. 2018 tanggal 18 Agustus 2021;
 - 5 (lima) Lembar Kronologi Hasil Temuan Inspektorat Setjen KPU RI An. Alfauzi Desember 2020;
 - 5 (lima) Lembar Kronologi Hasil Temuan Inspektorat Setjen KPU RI An. Yusdin Desember 2020;
 - 1 (satu) bundel Kronologi Hasil Temuan Inspektorat Setjen KPU RI An. HERDYANTI tanggal 20 Agustus 2021;
 - 8 (delapan) bundel Kronologi Hasil Temuan Inspektorat Setjen KPU RI An. Aswan tanggal 22 Agustus 2021;
 - 8 (delapan) Lembar Kronologi Hasil Temuan Inspektorat Setjen KPU RI An. Moh. Yakin tanggal 18 Agustus 2021;

- 1 (satu) Bundel Kronologi Hasil Temuan Inspektorat Setjen KPU RI An. Moh. Irfan tanggal 16 Oktober 2018
 - 4 (empat) Lembar Kronologi Hasil Temuan Inspektorat Setjen KPU RI An. Moh. Akram tanggal 22 Agustus 2021;
 - 1 (satu) Lembar Kronologi Hasil Temuan Inspektorat Setjen KPU RI An. Arjun Sandegi tanggal 22 Agustus 2021;
 - 3 (tiga) Lembar Kronologi Hasil Temuan Inspektorat Setjen KPU RI An. Irwan B., tanggal 13 Agustus 2021;
 - 2 (dua) Lembar Kronologi Hasil Temuan Inspektorat Setjen KPU RI An. Alisman tanggal 20 Agustus 2021;
 - 2 (dua) Lembar Kronologi Hasil Temuan Inspektorat Setjen KPU RI An. Siti Fatima tanggal 22 Agustus 2021;
 - 5 (lima) Lembar Kronologi Hasil Temuan Inspektorat Setjen KPU RI An. Syarifa Nurhaerani tanggal 22 Agustus 2021;
 - 1 (satu) Bundel Kronologi Hasil Temuan Inspektorat Sekjen KPU RI An. Febriani Tanggal 23 Agustus 2021;
 - 6 (enam) Lembar Sanggahan Atas Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Nomor : 03/PD TT/IU/IV/2021 Tanggal 28 April 2021;
- 18) 1 (satu) Lembar Sanggahan An. Hambali Tanggal 23 Agustus 2021
24. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium dan Penggunaan Dana Operasional PPK, PPS dan Pantarlih Kecamatan Basidondo Bulan Maret s/d April 2018;
25. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium dan Penggunaan Dana Operasional PPK, PPS dan Pantarlih Kecamatan Basidondo Bulan Mei 2018;
26. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium dan Penggunaan Dana Operasional PPK, PPS Kecamatan Basidondo Bulan Juni 2018;
27. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium dan Penggunaan Dana Operasional PPK, PPS Kecamatan Basidondo Bulan Juli 2018;
28. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium dan Penggunaan Dana Operasional PPK, PPS Kecamatan Basidondo Bulan Agustus 2018;

29. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium dan Penggunaan Dana Operasional PPK, PPS Kecamatan Basidondo Bulan September 2018;
30. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium dan Penggunaan Dana Operasional PPK, PPS Kecamatan Basidondo Bulan Oktober 2018;
31. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium dan Penggunaan Dana Operasional PPK, PPS Kecamatan Basidondo Bulan November 2018;
32. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium dan Penggunaan Dana Operasional PPK, PPS Kecamatan Basidondo Bulan Desember 2018;
33. 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Basidondo serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPK Basidondo untuk bulan Oktober 2018;
34. 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPS se kecamatan Basidondo serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPS se Kecamatan Basidondo untuk bulan Oktober 2018;
35. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPK Ogodeide serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Ogodeide untuk Bulan Maret 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
36. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPK Ogodeide serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Ogodeide untuk Bulan April 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
37. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPK Ogodeide serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Ogodeide untuk Bulan Mei 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
38. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPK Ogodeide serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Ogodeide untuk Bulan Juni 2018 dan Bukti

- Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
39. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPK Ogodeide serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Ogodeide untuk Bulan Juli 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
40. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPK Ogodeide serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Ogodeide untuk Bulan Agustus 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
41. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPK Ogodeide serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Ogodeide untuk Bulan September 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
42. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPK Ogodeide serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Ogodeide untuk Bulan Oktober 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
43. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPK Ogodeide serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Ogodeide untuk Bulan November 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
44. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPK Ogodeide serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Ogodeide untuk Bulan Desember 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
45. 1 (satu) bundel kwitansi / Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kec. Ogodeide antara lain Biaya ATK konsumsi bulan Maret & April 2018, Biaya penyelenggaraan Rapat-rapat bulan Maret & April 2018, Pengiriman dokumen ke Kabupaten bulan Maret & April 2018, sewa computer & Printer bulan April 2018

- serta Transport konsultasi ke KPU kabupaten & Supervisi PPS bulan Maret & April 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
46. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya kegiatan Bimtek PPS oleh PPK dan Bimtek Pantarlih oleh PPS se Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli Bulan April 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
47. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kec. Ogodeide antara lain Biaya ATK konsumsi bulan Mei 2018, Biaya penyelenggaraan Rapat-rapat bulan Mei 2018, Pengiriman dokumen ke Kabupaten bulan Mei 2018 serta Transport konsultasi ke KPU kabupaten & Supervisi PPS bulan Mei 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
48. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kec. Ogodeide antara lain Biaya ATK konsumsi bulan Juni 2018, Biaya penyelenggaraan Rapat-rapat bulan Juni 2018, Pengiriman dokumen ke Kabupaten bulan Juni 2018 sewa computer dan printer bulan Juni 2018 serta Transport konsultasi ke KPU kabupaten & Supervisi PPS bulan Juni 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
49. 1 (satu) bundel kwitansi / Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kec. Ogodeide antara lain Biaya ATK konsumsi bulan Juli 2018, Biaya penyelenggaraan Rapat-rapat bulan Juli 2018, Pengiriman dokumen ke Kabupaten bulan Juli 2018 serta Transport konsultasi ke KPU kabupaten & Supervisi PPS bulan Juli 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
50. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kec. Ogodeide antara lain Biaya ATK konsumsi bulan Agustus 2018, Biaya penyelenggaraan Rapat-rapat bulan Agustus 2018, Pengiriman dokumen ke Kabupaten bulan Agustus 2018 sewa computer dan printer bulan Agustus 2018 serta Transport konsultasi ke KPU kabupaten & Supervisi PPS

bulan Agustus 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;

51. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kec. Ogodeide antara lain Biaya ATK konsumsi bulan September 2018, Biaya penyelenggaraan Rapat-rapat bulan September 2018, Pengiriman dokumen ke Kabupaten bulan September 2018 serta Transport konsultasi ke KPU Kabupaten & Supervisi PPS bulan September 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
52. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kec. Ogodeide antara lain Biaya ATK konsumsi bulan Oktober 2018, Biaya penyelenggaraan Rapat-rapat bulan Oktober 2018, Pengiriman dokumen ke Kabupaten bulan Oktober 2018 sewa computer dan printer bulan Oktober 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
53. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kec. Ogodeide antara lain Biaya ATK konsumsi bulan November 2018, Biaya penyelenggaraan Rapat-rapat bulan November 2018, biaya sewa computer dan printer bulan November 2018, biaya koordinasi ke KPU & Supervisi PPS untuk bulan November 2018 dan pengiriman Dokumen ke Kabupaten Bulan November 2018 serta Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
54. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kec. Ogodeide antara lain Biaya ATK konsumsi bulan Desember 2018, Biaya penyelenggaraan Rapat-rapat bulan Desember 2018, biaya sewa computer dan printer untuk bulan Desember 2018, biaya koordinasi ke KPU bulan Desember 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Ogodeide;
55. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 334 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di kabupaten Tolitoli;

56. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Operasional PPK Kecamatan Dampal Utara antar lain Biaya ATK & Komsumsi bulan Maret & April 2018, Biaya Penyelenggaraan Rapat-rapat bulan Maret & April 2018, Pengiriman Dokumen ke Kabupaten bulan Maret & April 2018, Sewa Komputer & Printer bulan April 2018 serta Transport Konsultan ke KPU Kabupaten & Supervisi PPS bulan Maret & April 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dampal Utara;
57. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Kegiatan Bimtek PPS oleh PPK dan Bimtek Pantarlih oleh PPS se Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dampal Utara;
58. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Bantuan transport Pantarlih se Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dampal Utara;
59. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dampal Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPK Dampal Utara untuk bulan Maret 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dampal Utara;
60. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dampal Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPK Dampal Utara untuk bulan April 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dampal Utara;
61. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se Kecamatan Dampal Utara tahun 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dampal Utara;
62. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dampal Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPK Dampal Utara untuk bulan Mei 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dampal Utara;

63. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dampal Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPK Dampal Utara untuk bulan Juni 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dampal Utara;
64. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dampal Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPK Dampal Utara untuk bulan Juli 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dampal Utara;
65. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dampal Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPK Dampal Utara untuk bulan Agustus 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dampal Utara;
66. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dampal Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPK Dampal Utara untuk bulan September 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dampal Utara;
67. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dampal Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPK Dampal Utara untuk bulan Oktober 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dampal Utara;
68. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dampal Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPK Dampal Utara untuk bulan November 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dampal Utara;
69. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dampal Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPK Dampal Utara untuk bulan Desember 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dampal Utara;
70. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 334 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia

Pemilihan Kecamatan Pada Penyelenggaraan Pemiliha Umum Tahun 2019 di kabupaten Tolitoli;

71. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPK Tolitoli Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Tolitoli Utara untuk Bulan Maret 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Tolitoli Utara;
72. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPK Tolitoli Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Tolitoli Utara untuk Bulan April 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Tolitoli Utara;
73. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPK Tolitoli Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Tolitoli Utara untuk Bulan Mei 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Tolitoli Utara;
74. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPK Tolitoli Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Tolitoli Utara untuk Bulan Juli 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Tolitoli Utara;
75. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPK Tolitoli Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Tolitoli Utara untuk Bulan Agustus 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Tolitoli Utara;
76. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPK Tolitoli Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Tolitoli Utara untuk Bulan September 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Tolitoli Utara;
77. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPK Tolitoli Utara serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Tolitoli Utara untuk Bulan Oktober 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Tolitoli Utara;

78. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kecamatan Tolitoli Utara, antara lain biaya ATK & Komsumsi untuk bulan Desember 2018, Biaya Penyelenggaraan Rapat-rapat untuk bulan Desember 2018, Biaya Sewa Komputer & Printer untuk bulan Desember 2018, dan biaya Koordinasi ke KPU dan Supervisi ke PPS untuk bulan Desember 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Tolitoli Utara;
79. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium dan Operasional PPK Kecamatan Tolitoli Utara untuk Bulan Maret & April 2018;
80. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PPK Kecamatan Tolitoli Utara Bulan Juni 2018;
81. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PPK Kecamatan Tolitoli Utara Bulan Juli 2018;
82. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PPK Kecamatan Tolitoli Utara Bulan Agustus 2018;
83. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PPK Kecamatan Tolitoli Utara Bulan September 2018;
84. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PPK Kecamatan Tolitoli Utara Bulan Oktober 2018;
85. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PPK Kecamatan Tolitoli Utara Bulan November 2018;
86. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PPK Kecamatan Tolitoli Utara Bulan Desember 2018;
87. SK Bupati Nomor 334 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Sekertariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kab.Tolitoli;
88. 1 bundel Kuitansi Bukti pembayaran Honorium dan biaya Operasional Ketua dan Anggota PPK Dampal Selatan bulan Maret 2018;
89. 1 bundel Kuitansi Bukti pembayaran Honorium dan biaya Operasional Ketua dan Anggota PPK Dampal Selatan bulan April 2018;
90. 1 bundel Kuitansi Bukti pembayaran Honorium dan biaya Operasional Ketua dan Anggota PPK Dampal Selatan bulan Mei 2018;

91. 1 bundel Kuitansi Bukti pembayaran Honorium dan biaya Operasional Ketua dan Anggota PPK Dampal Selatan bulan Juni 2018;
92. 1 bundel Kuitansi Bukti pembayaran Honorium dan biaya Operasional Ketua dan Anggota PPK Dampal Selatan bulan Juli 2018;
93. 1 bundel Kuitansi Bukti pembayaran Honorium dan biaya Operasional Ketua dan Anggota PPK Dampal Selatan bulan Agustus 2018;
94. 1 bundel Kuitansi Bukti pembayaran Honorium dan biaya Operasional Ketua dan Anggota PPK Dampal Selatan bulan September 2018;
95. 1 bundel Kuitansi Bukti pembayaran Honorium dan biaya Operasional Ketua dan Anggota PPK Dampal Selatan bulan Oktober 2018;
96. 1 bundel Kuitansi Bukti pembayaran Honorium dan biaya Operasional Ketua dan Anggota PPK Dampal Selatan bulan November 2018;
97. 1 bundel kuitansi pembayaran biaya operasional PPS dan biaya Koordinasi ke PPKK dan cokolit Bulan Desember;
98. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Baolan Bulan Maret 2018 dan April 2018;
99. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Baolan Bulan April 2018;
100. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Baolan Bulan Mei 2018;
101. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Baolan Bulan Juni 2018;
102. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Baolan Bulan Juli 2018;

103. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Baolan Bulan Agustus 2018;
104. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Baolan Bulan September 2018;
105. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Baolan Bulan Oktober 2018;
106. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Baolan Bulan November 2018;
107. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Baolan Bulan Desember 2018;
108. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 334 tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Tolitoli;
109. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kecamatan Dondo antara lain Biaya ATK & Komsumsi bulan Maret & April 2018, Biaya Penyelenggaraan rapat-rapat bulan Maret & April 2018, Pengiriman Dokumen ke Kabupaten bulan Maret & April 2018, Sewa Komputer & Printer bulan April 2018 serta Transport Konsultasi ke KPU Kabupaten & Supervisi PPS Bulan Maret & April 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo;
110. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kecamatan Dondo antara lain Biaya ATK & Komsumsi bulan Mei 2018, Biaya Penyelenggaraan rapat-rapat bulan Mei 2018, Pengiriman Dokumen ke Kabupaten bulan Mei 2018, serta Transport Konsultasi ke KPU Kabupaten & Supervisi PPS Bulan Mei 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo;
111. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kecamatan Dondo antara lain Biaya ATK & Komsumsi bulan Juni 2018, Biaya Penyelenggaraan rapat-rapat bulan Juni

- 2018, Pengiriman Dokumen ke Kabupaten bulan Juni 2018, Sewa Komputer dan Printer bulan Juni 2018 serta Transport Konsultasi ke KPU Kabupaten & Supervisi PPS Bulan Juni 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo;
112. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kecamatan Dondo antara lain Biaya ATK & Komsumsi bulan Juli 2018, Biaya Penyelenggaraan rapat-rapat bulan Juli 2018, Pengiriman Dokumen ke Kabupaten bulan Juli 2018, serta Transport Konsultasi ke KPU Kabupaten & Supervisi PPS Bulan Juli 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo;
113. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPS Kecamatan Dondo sebanyak 16 PPS, antara lain Biaya ATK & Komsumsi bulan Agustus 2018, Biaya Penyelenggaraan rapat-rapat bulan Agustus 2018, Pengiriman Dokumen ke Kabupaten bulan Agustus 2018, Biaya Sewa Komputer dan Printer bulan Agustus 2018 serta Transport Konsultasi ke Kecamatan Bulan Agustus 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo;
114. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPS se Kecamatan Dondo sebanyak 16 PPS, antara lain Biaya ATK & Komsumsi bulan September 2018, Biaya Penyelenggaraan rapat-rapat bulan September 2018, Pengiriman Dokumen ke Kabupaten bulan September 2018, serta Transport Konsultasi ke Kecamatan Bulan September 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo;
115. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kecamatan Dondo antara lain Biaya ATK & Komsumsi bulan Oktober 2018, Biaya Penyelenggaraan rapat-rapat bulan Oktober 2018, Pengiriman Dokumen ke Kabupaten bulan Oktober 2018, Biaya Sewa Komputer dan printer Bulan Oktober 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo,
116. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPS se Kecamatan Dondo sebanyak 16 PPS, antara lain Biaya

ATK & Komsumsi bulan Desember 2018, Biaya Penyelenggaraan rapat-rapat bulan Desember 2018, Biaya Sewa Komputer dan Printer untuk bulan Desember 2018 Biaya Koordinasi ke PPK untuk bulan Desember 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo;

117. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dondo serta Honorarium Sekretariat & Staf Sekretariat PPK Dondo untuk bulan Maret 2018;
118. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dondo serta Honorarium Sekretariat & Staf Sekretariat PPK Dondo untuk bulan April 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo;
119. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dondo serta Honorarium Sekretariat & Staf Sekretariat PPK Dondo untuk bulan Mei 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo;
120. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPS se Kecamatan Dondo serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPS se Kecamatan Dondo untuk bulan Juni 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo;
121. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dondo serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPK Dondo untuk bulan Juli 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo;
122. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dondo serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPK Dondo untuk bulan Agustus 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo;
123. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dondo serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPK Dondo untuk bulan September 2018 dan Bukti

Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo;

124. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dondo serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPK Dondo untuk bulan Oktober 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo;
125. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPK Dondo serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPK Dondo untuk bulan Nopember 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo;
126. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorarium Ketua dan Anggota PPS se Kecamatan Dondo serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretariat PPS se Kecamatan Dondo untuk bulan Desember 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dondo;
127. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Bulan maret, April Tahun 2018 Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD Tahun 2019 PPK Kecamatan Dondo;
128. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Bulan Mei Tahun 2018 Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD Tahun 2019 PPK Kecamatan Dondo;
129. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Bulan Juni Tahun 2018 Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD Tahun 2019 PPK Kecamatan Dondo;
130. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Bulan Juli Tahun 2018 Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD Tahun 2019 PPK Kecamatan Dondo;
131. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Bulan Agustus Tahun 2018 Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD Tahun 2019 PPK Kecamatan Dondo;

132. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Bulan September Tahun 2018 Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD Tahun 2019 PPK Kecamatan Dondo;
133. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Bulan Oktober Tahun 2018 Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD Tahun 2019 PPK Kecamatan Dondo;
134. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Bulan Nopember Tahun 2018 Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD Tahun 2019 PPK Kecamatan Dondo;
135. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Bulan Desember Tahun 2018 Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD Tahun 2019 PPK Kecamatan Dondo;
136. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPK Dakopemear serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Dakopemear untuk Bulan April 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemear;
137. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPS se Kecamatan Dakopemear serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPS se Kecamatan Dakopemear untuk Bulan April 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemear;
138. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPK Dakopemear serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Dakopemear untuk Bulan Agustus 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemear;
139. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPS se Kecamatan Dakopemear serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPS se Kecamatan Dakopemear untuk Bulan Agustus 2018 dan Bukti Tanda

Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemean;

140. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPS se Kecamatan Dakopemean sebanyak 4 PPS, antara lain Biaya ATK & Komsumsi bulan Agustus 2018, Biaya Penyelenggaraan Rapat-rapat bulan Agustus 2018, Pengiriman Dokumen ke Kabupaten Bulan Agustus 2018, Biaya Sewa Komputer dan printer bulan Agustus 2018 serta Transport Konsultan ke Kecamatan bulan Agustus 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemean;
141. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPK Dakopemean serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Dakopemean untuk Bulan September 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemean;
142. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPS se Kecamatan Dakopemean serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPS se Kecamatan Dakopemean untuk Bulan September 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemean;
143. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kecamatan Dakopemean antara lain Biaya ATK & Komsumsi bulan September 2018, Biaya Penyelenggaraan Rapat-rapat bulan September 2018, Pengiriman Dokumen ke Kabupaten Bulan September 2018, serta Transport Konsultan ke KPU Kabupaten dan Supervisi PPS bulan September 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemean;
144. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPS se Kecamatan Dakopemean sebanyak 4 PPS, antara lain Biaya ATK & Komsumsi bulan September 2018, Biaya Penyelenggaraan Rapat-rapat bulan September 2018, Pengiriman Dokumen ke Kabupaten Bulan September 2018, serta Transport Konsultan ke Kecamatan bulan September

- 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemean;
145. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPK Dakopemean serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Dakopemean untuk Bulan Oktober 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemean;
146. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPS se Kecamatan Dakopemean serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPS se Kecamatan Dakopemean untuk Bulan Oktober 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemean;
147. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kecamatan Dakopemean antara lain Biaya ATK & Komsumsi bulan Oktober 2018, Biaya Penyelenggaraan Rapat-rapat bulan Oktober 2018, Pengiriman Dokumen ke Kabupaten Bulan Oktober 2018, Biaya Sewa Komputer dan printer bulan Oktober 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemean;
148. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPS se Kecamatan Dakopemean sebanyak 4 PPS, antara lain Biaya ATK & Komsumsi bulan Oktober 2018, Biaya Penyelenggaraan Rapat-rapat bulan Oktober 2018, Pengiriman Dokumen ke Kabupaten Bulan Oktober 2018, Biaya Sewa Komputer dan Printer bulan Oktober 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemean;
149. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPK Dakopemean serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Dakopemean untuk Bulan Nopember 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemean;
150. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPS se Kecamatan Dakopemean serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPS se Kecamatan Dakopemean untuk Bulan Nopember 2018 dan Bukti Tanda

Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemear;

151. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPK Dakopemear serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK Dakopemear untuk Bulan Desember 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemear;
152. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Honorium Ketua dan Anggota PPS se Kecamatan Dakopemear serta Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPS se Kecamatan Dakopemear untuk Bulan Desember 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemear;
153. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kecamatan Dakopemear antara lain Biaya ATK & Komsumsi bulan Nopember 2018, Biaya Sewa Komputer dan Printer bulan Nopember 2018, Biaya koordinasi ke KPU dan Supervisi ke PPS untuk bulan Nopember 2018, dan Pengiriman Dokumen ke Kabupaten bulan Nopember 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemear;
154. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPS se Kecamatan Dakopemear sebanyak 4 PPS antara lain Biaya ATK & Komsumsi bulan Nopember 2018, Biaya penyelenggaraan Rapat-rapat bulan Nopember 2018, Biaya Sewa Komputer dan Printer bulan Nopember 2018, Pengiriman Dokumen ke Kabupaten bulan Nopember 2018, dan Biaya koordinasi ke PPK & Coklit untuk bulan Nopember 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemear;
155. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPK Kecamatan Dakopemear antara lain Biaya ATK & Komsumsi bulan Desember 2018, Biaya Penyelenggaraan Rapat-rapat bulan Desember 2018 Biaya Sewa Komputer dan Printer bulan Desember 2018, Biaya koordinasi ke KPU dan Supervisi ke PPS untuk bulan Desember 2018 dan Bukti Tanda

Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemean;

156. 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti Pembayaran, Biaya Operasional PPS se Kecamatan Dakopemean sebanyak 4 PPS antara lain Biaya ATK & Komsumsi bulan Desember 2018, Biaya penyelenggaraan Rapat-rapat bulan Desember 2018, Biaya Sewa Komputer dan Printer bulan Desember 2018, dan Biaya koordinasi ke PPK & Coklit untuk bulan Desember 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Dakopemean;
157. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium dan Operasional PPK Kecamatan Dakopemean Bulan Maret & April Tahun 2018;
158. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium dan Operasional PPK Kecamatan Dakopemean Bulan Mei Tahun 2018;
159. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium PPK & Sekretariat PPK, PPS & Sekretariat PPS Kecamatan Dakopemean Bulan Mei Tahun 2018;
160. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium Biaya Operasional PPK & Sekretariat Kecamatan Dakopemean Bulan Juni Tahun 2018;
161. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium Ketua & Anggota PPK & Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK, serta Honorarium Ketua PPS & Anggota PPS & Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPS Kecamatan Dakopemean Bulan Juli 2018;
162. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium Ketua & Anggota PPK & Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK, serta Honorarium Ketua PPS & Anggota PPS & Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPS Kecamatan Dakopemean Bulan Juni 2018;
163. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium Ketua & Anggota PPK & Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPK, serta Honorarium Ketua PPS & Anggota PPS & Honorarium Sekretaris & Staf Sekretaris PPS Kecamatan Dakopemean Bulan Agustus 2018;

164. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium PPK Kecamatan Dakopemear dan PPS se Kecamatan Dakopemear Bulan Oktober 2018;
165. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium PPK & Sekretariat PPK Kecamatan Dakopemear dan Honorarium PPS se Kacamatan Dakopemear Bulan Nopember & Desember 2018;
166. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bintek PPS dan Pantarlih Kec. Galang oleh PPK pada tanggal 14 dan 16 April 2018;
167. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Honorarium Operasional PPK Kec. Galang dan PPS Kec. Galang Bulan Maret dan April 2018;
168. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana PPK Kec. Galang Bulan Mei 2018;
169. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana PPK Kec. Galang Bulan Juni 2018;
170. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana PPK Kec. Galang Bulan Juli 2018;
171. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana PPK Kec. Galang Bulan Agustus 2018;
172. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana PPK Kec. Galang Bulan September 2018;
173. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana PPK Kec. Galang Bulan Oktober 2018;
174. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana PPK Kec. Galang Bulan November 2018;
175. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana PPK Kec. Galang Bulan Desember 2018;
176. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Lampasio serta Honorarium Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Lampasio untuk bulan Nopember 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Lampasio;
177. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Operasional PPS se Kecamatan Lampasio sebanyak 9 PPS, antara lain biaya ATK dan komsumsi bulan Desember 2018, Biaya

- Penyelenggaraan Rapat-rapat bulan Desember 2018, Biaya sewa computer dan printer bulan Desember 2018 dan biaya Koordinasi ke PPK dan Coklit untuk bulan Desember 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Lampasio;
178. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPS se Kecamatan Lampasio serta Honorarium Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS se Kecamatan Lampasio untuk bulan Desember 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Lampasio;
179. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Lampasio serta Honorarium Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Lampasio untuk bulan Oktober 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Lampasio;
180. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Lampasio serta Honorarium Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Lampasio untuk bulan September 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Lampasio;
181. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Lampasio serta Honorarium Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Lampasio untuk bulan Agustus 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Lampasio;
182. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Lampasio serta Honorarium Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Lampasio untuk bulan Juli 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Lampasio;
183. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Lampasio serta Honorarium Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Lampasio untuk bulan Juni 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten. Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Lampasio;
184. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Biaya Operasional PPS se Kecamatan Lampasio sebanyak 9 PPS, antara lain

- biaya ATK dan konsumsi bulan Juni 2018, Biaya Penyelenggaraan Rapat-rapat bulan Juni 2018, Pengiriman dokumen ke Kabupaten bulan Juni 2018 sewa komputer dan printer bulan Juni 2018 serta Transport Konsultan ke Kecamatan bulan Juni 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Lampasio;
185. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPK Lampasio serta Honorarium Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Lampasio untuk bulan April 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Lampasio;
186. 1 (satu) bundel kwitansi/Bukti Pembayaran Honorarium Ketua dan Anggota PPS se Kecamatan Lampasio serta Honorarium Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS se Kecamatan Lampasio untuk bulan Maret 2018 dan Bukti Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tolitoli Kepada PPK Kecamatan Lampasio;
187. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terima LHP yang sama dengan Kejaksan Tanggal 28 April 2021 Nomor 66/KU.06/7204/2022 Tanggal 22 Agustus 2022;
188. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak membuat BA pada pertemuan staf dalam rangka TL. PDTT Tahun 2018 Nomor 67/KU.06/7204/2022 Tanggal 23 Agustus 2022;
189. 1 (satu) bundel Surat Tagihan Atas Temuan Kerugian Negara Nomor 71/PP.01.2-SD/7204/Sek-Kab/VIII/2021 Tanggal 19 Agustus 2021;
190. 1 (satu) bundel Surat laporan progress pengembalian keuangan negara berdasarkan audit investigasi Nomor 87/KU.06.1/7204/2021 Tanggal 8 Oktober 2021;
191. 1 (satu) bundel Surat Kejaksan Negeri Tolitoli yang ditujukan ke Sekjend Nomor R-03/P.2.12/Dek.1/12/2019 Tanggal 19 Desember 2019 dan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Inspektorat KPU RI Nomor 804/RT.02.1-ST/08/INSP/XI/2020 Tanggal 27 November 2020;
192. 1 (satu) bundel Surat Penegasan Tindak Lanjut Hasil PDTT KPU Tahun Anggaran 2018 Nomor 141/PW.02-SD/IW3/IU/VIII/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 dan Surat Tugas Inspektorat KPU RI Dalam Rangka Audit Perhitungan Kerugian

Negara Nomor 83/RT.02.1-ST/IU/2021 Tanggal 9 September 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

9. Membebaskan kepada Terdakwa **Firdaus** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5 000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Sugiyanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aris T. Kahohon, S.H., dan Alam Nur, S.H., M.Kn., masing-masing Hakim *Ad Hoc* sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 02 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sugiarto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Aris T. Kahohon, S.H.

ttd

Alam Nur, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Sugiarto, S.H.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Dikeluarkan Untuk Keperluan Dinas
PENGADILAN NEGERI PALU KELAS 1A

PH. Panitera



Hendra